TRI ATMOJO SEJATI

(Calon wartawan)

Dalam kolaborasi dengan partner :

TRI HARTANTO

Melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat dewasa ini, sangat menarik untuk dikaji ulang. Apa sebenarnya yang menjadi indikator penyebab munculnya probema sosial kontemporer di Indonesia. Berikut hasil wawancara antara **MAHKAMAH (M)** dengan **RADEN ABDUL GHAFAR KHARIM (G)** salah satu asisten dosen di lingkungan Fakultas Fisipol UGM Yogyakarta.

M : *Apa yang melatarbelakangi lahirnya bermacam Ormas belakangan ini?*

G : Ada dua perspektif yang kita gunakan, yang paling tidak agak jauh berbeda tentang penilaian adanya organisasi baru ini, seperti PCPP, ICMI dan sebagainya. Pertama, adanya disfungsi antara infrastruktur dan suprastruktur politik yang sudah ada. Seperti DPR, yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat butuh artikulasi kepentingan, butuh aspirasinya terbawa ke atas terutama oleh parpol, secara kaidatik (apa yang seharusnya) tapi nyatanya partai tidak bisa berfungsi seperti ini. Sehingga timbul kelompok atau cara-cara alternatif dimana masyarakat bisa mengartikulasikan kepentingan mereka. Dalam situasi seperti inilah timbul Ormas-ormas baru.

Sebenarnya hal ini merupakan pengulangan-pengulangan sejarah sekitar tahun 70-an.

dimana banyak bermunculan lembaga-lembaga berbentuk yayasan, yang mempunyai kepentingan-kepentingan ekonomi dsb, dibalik rumusan ideal dimana mereka ingin mengartikulasikan kepentingan orang yang dipimpinnya. Perspektif yang lain, adanya tema kebangsaan yang dibawa oleh Ormas tersebut merupakan revitalisme aliran politik di Indonesia. ICMI, dicurigai oleh Gusdur sebagai pemancing aliran ini, karena dia secara faktual berciri agama Islam. Sehingga aliran selain Islam ingin membuktikan diri dengan tema abangan atau nasionalisme, sehingga timbul PCPP, YKPK , itu yang bisa saya lihat.

M : *Apa penyebab dari disfungsi ini sebenarnya ?*

G : Banyak penyebabnya, baik bersifat struktural maupun kultural. Bisa sistem pemilinya yang tidak memungkinkan terpilihya calon yang qualivaid, bisa mekanisme kerja mereka ketika berhadapan dengan eksekutif dst. Bisa juga karena alasan budaya, sehingga mereka tidak bisa powerfull terhadap kemauan presiden, yang dalam perspektif budaya diformalkan dalam UUD 45.

M : *Berdirinya Ormas itu sendiri apakah tidak menandakan adanya perpecahan dalam tubuh Orpol yang ada?*

G : Banyak yang menduga ormas baru ini merupakan wadah barisan orang yang sakit hati. Seperti adanya Mathori Abdul Jalil, kalo tidak salah di tubuh YKPK yang tersingkir dalam persaingan hegemoni di PPP . Juga adanya nama Gafar Rahman, orang yang tersingkir karena masalah SDSB. Hal ini merupakan indikasi adanya fiksi internal dalam partai dimana mereka dulu ada. Hal

ini berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja partai politik seperti dalam disfungsi tadi.

M : *Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia ini apakah sudah cocok untuk diterapkan* ?

G : Masalah ini sebenarnya relatif, yang bisa kita gunakan sebagai penilaian adalah apakah sistem itu fungsional ataukah tidak, bukan seperti sistaem liberal karena tidak cocok dengan kultur budaya dan sudah gagal tahun 60-an. Menurut saya secara fungsional kalau sudah berjalan dengan baik itu yang cocok, terlepas ini merupakan budaya impor, saya tidak terlalu mendikotomokan antara barat dan timur, karena demokrasi itu sendiri universal. Tetapi kita lihat apakah sistem itu secara fungsional bisa memberikan mekaisme antara yang dikuasai dan yang menguasai agar tidak terlalu senjang. Antara infrastruktur dan suprastruktur pollitik antara eksekutif dan legislatif yang imbang. Hal ini yang saya pikir kaidah suatu sistem itu cocok atau tidak. Kalau melihat itu kita meragukan apakah sudah cocok sistem sekarang, nyatanya secara fungsioanal belum maksimal.

M : *Tentang Pemilu 1997, apakah ada dan perlu adanya suksesi, atau hanya seperti Pemilu terdahulu ?*

G : Sulit untuk memperkirakan politik negara kita, kapan suksesi itu akan terjadi dan siapa yang menggantikan. Kita lihat analoginya, dalam pemilihan Kepala Desa, seluruh masyarakat tahu siapa calonnya. Tetapi bila kita naik ke tingkat diatasnya. Dalam pemilihan bupati, paling yang tahu hanya Gubernur, Pangdam dan Kaditsospoldst,sedangkan DPRD tingkat II merupakan pihak terakhir yang tahu di situ. Naik ke tingkat atas lagi, pemilihan Gubernur paling hanya Mendagri dan

presidan yang tahu bukan rakyatnya, sedangkan kalau presiden siapa yang tahu?

Terlebih kita tahu pemilu tidak berkait langsung dengan kepemimpinan nasional, tetapi hanya memilih wakil rakyat di DPR, MPR dan baru mereka yang bersidang. Dan ini yang bisa menentukan suksesi, jadi kita tidak dapat memakai pemilu untuk memperkirakan suksesi.

M : *Mengenai pemikiran supaya di Indonesia menggunakan sistem pemilu distrik ?*

G : Sejauh yang saya lihat penggunaan sistem distrik belum tepat, banyak kendala yang bisa kita diskusikan secara panjang lebar. Berdasarkan penelitian Bumirian Budiharjo dalam salah satu bukunya bahwa yang dirugikan adalah partai politik yang digunakan pemerintah selain Golkar, bukan partai politik dalam arti ilmiah yang memasukkan Golkar ke dalamnya. Jadi bila sistem distrik ini digunakan, maka PPP dan PDI akan turun suaranya, sedangkan Golkar memperoleh keuntungan. Berdasarkan informasi ini, maka sistem pemilu distrik belum saatnya diterapkan, masih tetap sistem proporsional yang terbaik. Tinggal kita memfungsionalkan sistem ini, lebih membuat mekanisme penyelenggaraan yang lebih bersih jangan hanya menggunakan kaidah sloganistik tanpa adanya realita. Seperti belakangan ini untuk memasukkan asas jurdil dalam pemilu ditolak, katanya inkonstitusional... saya pikiritu naif sekali. Itu yang kita butuhkan mekaniskme yang berjalan lebih mulus tanpa mengganti sistemnya sendiri.

M : *Kesimpulannya sistem ini kita pertahankan dulu?*

G : Ya...wadahnya dan isinya yang kita perbaiki. Wadahnya

sedangkan isinya tidak kita perbaiki sama juga tiada artinya.

M : *Sebenarnya bagaimana peran ABRI sendiri?*

G : Saya pikir kelihatan sekali ABRI sudah menjaga jarak dengan Golkar.Figur ketua Golkar, misalnya. Dalam hal tertentu tidak diterima sepenuhnya oleh ABRI, yang konon saat itu telah mempunyai calon sendiri, tetapi nyatanya Harmoko yang terpilih dan itu menjadi persoalan tersendiri buat ABRI. Bahkan dalam peta kekuasaan nasional pun ABRI telah mempunyai pesaing-pesaing, kalau dulu ada segitiga kekuasaan dimana disitu ada Soeharto, Golkar dan ABRI. Tapi belakangan ini muncul adanya ICMI yang mempunyai real politik yang kuat sehingga sekarang tidak lagi berbentuk segitiga tetapi berbentuk piramid. DImana di puncak ada Soeharto dan di bawahnya ada ABRI, Golkar dan ICMI. Walaupun ICMI tidak sekuat ABRI tapi akan memberikan imbangan yang kuat, saya pikir demikian.

T : *Sejauh mana hubungannya dengan dwi fungsi ABRI itu sendiri?*

G : Dwi fungsi ABRI itu sendiri, sampai kapanpun tetap akan Dipertahankan sebagai pelaksaan doktrin ABRI. Kadang orang secara ideal menyalahartikan dwi fungsi itu sendiri dengan kekaryaan. Kalau ABRI yang ditugaskan di DPRD / jadi bupati itu kekaryaan . Idealnya yang dimaksud dengan dwi fungsi ABRI se cara sederhana begini, ABRI tidak hanya datang pada saat adanya kebakaran tapi berusaha mencegah kebakaran itu sendiri. Jadi sebagai kekuatan sosial politik yang oleh ABRI sendiri secara manis disebut dengan ABRI sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit. Hal ini sangat bagus, masalahnya adalah mengerem mereka dalam kekaryaan, agar tidak berlebihan. Bagaimanapun secara riil mereka kuat, tetapi secara proporsi masyarakat mere

ka tidak semestinya memborong semua porsi yang mungkin, tetapi sekarang saya lihat gejala ini sudah mulai menurun. Konon di Jawa Timur 50% lebih bupati dari sipil.

M : *Sinyalemen tumbuhnya OTB yang katanya menggejala di golongan mahasiswa. Apakah sudah tampak adanya indikasi lahirnya OTB itu sendiri ?*

G : Beralasan sekali pendapat munculnya OTB dan tidak hanya menakut-nakuti masyarakat. Ini diibaratkan, kita sudah mengetahui suatu lagu, lalu mendengar intronya kita tahu itu lagu A..dsb. Dan militer yang merasa tahu tentang PKI, begitu ada gejala sedikitpun itu ditangarai sebagai PKI. Masalahnya adalah kejelasan tentang gejala macam apa indikasi komunis itu. Jadi tidak hanya asal anti pemerintah langsung dibilang itu OTB. Sangat tidak masuk akal seorang Arief Budiman yang sangat anti komunis dimasukkan dalam golongan OTB, jadi kejelasan semacam 'ini yang sedang muncul dalam mekanisme kerja politik kita. Bagitu juga ketika Ginanjar menunjuk adanya LSM yang menyiarkan dan menjelek-jelekkan Indonesia di luar negeri, langsung LSM-LSM memprotesnya. Semua ini karena tidak adanya kejelasan tentang LSM mana yang melakukannya dan kebohongan macam apa yang dimaksudkan. Bahkan, kita lihat sekarang adanya pertentangan dalam kabinet kita, yang semua ini karena ketidakjelasan itu sendiri.

M : *Adakah kemungkinan timbulnya komunis di Indonesia sekarang ini ?*

G : Sulit meramalkan, karena ide komunistik seperti egalitianism, keadilan sosial akan berlangsung sepanjang jaman.

Jadi yang lita lakukan adalah mengawasi kearah mana akar rumpur itu berjalan dan dan menghilangkan tanah subur berkembangnya idilogi ini sendiri.

M : *Apakah ada hubungan gejala politik ini dengan isu keterbukaan yang telah didengungkan?*

G : Ini merupakan globalisasi paradok, dimana semakin menggIobal masyarakat dan semakin informasi batas negara tidak relevan, semakin butuh orang tempat untuk mengaktualisasikannya diri mereka.

M : *Mungkinkah dari pemerintah sendiri mengadakan semacam pengekangan supaya masyarakat tidak masuk dalam Ormas-Ormas baru tersebut ?*

G : Boleh jadi ada kekhawatiran seperti itu, terutama Golkar dan parpol. Barangkali timbul perenungan dalam hati mereka, bahwa mereka sangat tidak berfungsi dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat, meski mereka tidak dapat memilih organisasi itu dalam Pemilu...entah golputlah yang penting mereka ada sarana untuk mengartikulasikan kepentingannya. Barabgkali juga ada kekhawatiran pemerintah, tumbuhnya organisasi ini bagai jamur di musim hujan, kalau tidak ada larangan-larangan. Secara logika, kita lihat kemunculan mereka, pada saat 'center of power'ada di luar negeri, yang tidak dapat dikendalikan oleh pembantu-pembantunya. Begitu center ofpower itu kembali yang dilakukan adalah mengerem laju pertumbuhan organisasi ini.

M : *Adanya upaya Golkar supaya tetap menjadi single mayority, juga merupakan bentuk pengekangan kebebasan itu sendiri?*

G : Sebenarnya banyak yang bertentangan. Sebenarnya dengan 50%

+ 1 Golkar sudah merupakan mayority. Tetapi karena Golkar ingin semua suara diraihnya, ini diaggap sebagai partai politik yang menaiknya tersudut sehingga menimbulkan reaksi dari partai lain yang terdesak.Seperi pendesakan terhadap PDI pada konflik internal,yang sesungguhnya menguntungkan PDI itu sendiri. Bagaimanapun secara naluriah orang akan simpati pada kaum yang tertindas, minimal dia diekspose secara gratis. Bahkan belakangan ini ada kejadian di luar kontrol Golkar yang seharusnya untuk mempertahankan single mayority ternyata menjadi pukulan balik bagi Golkar, sehingga tampak adigang, adidung, adiguna yang sangat tidak disukai.Bahkan banyak kasus kesalahan yang dilakukan oleh fungsionaris dan kader Golkar sendiri.

M : *Gejala merebaknya antusias pemuda terutama di daerah yang masuk PDI, juga merupakan sinyal bagi Golkar dalam mempertahankan single mayority?*

6 : Orang menganggap kaum muda yang lahir di jaman Orde Baru, merupakan kaum muda yang bersifat pragmatis yang lepas dari idiologi yang kaku dalam menentukan pilihan politik. Mungkin faktor ketertindasan dan faktor Bung Karno, yang dianggap menarik dalam romantisme kemudaan. Tetapi ketika mereka menentukan pilihan politik, barangkali pragmatisme yang akan muncul bukan romantisme kemudaan. Barangkali mereka berfikir ketika memilih Parpol, maka suaranya akan 'dipalsukan' yang berarti digolkarkan. Atau ada kekhawatiran mereka bila memilih Parpol dan menghasilkan satu kursi untuk Parpol tersebut, mungkin tidak efektif. Mana ada aggota Parol yang qualifile ? mereka tidak punya kesempatan untuk mengembangkan kesempatan.

Paling hanya beberapa gelintir yang bisa melakukannya.